



-Conservation Planner-



RENCANA KERJA 2017

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2017**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

JAKARTA
2016

RENCANA KERJA 2017
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
ISBN : 978-602-60595-2-9
Pengarah : Direktur Jenderal KSDAE
Ketua : Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Setditjen
KSDAE
Penyunting : Kepala Subbagian Program dan Anggaran
Desain Grafis : Staf Subbagian Program dan Anggaran
Penerbit : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem
Penulis : Bagian Program dan Evaluasi

Diterbitkan oleh :
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp : +62 21 5730301, 5730316, Fax : +62 21 5733437



-Conservation Planner-



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Nomor: P.4/KSDAE/Set/Ren.0/9/2016

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan...

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenLhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.72/MenLhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.
32. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2017 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2016
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,



Tachrir Fathoni
Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Nomor: P.4/KSDAE/Set/Ren.0/9/2016

TENTANG

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2017**





RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2017

Dokumen ini merupakan Rencana Pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 yang memuat indikasi anggaran dan kinerja tahun 2017.

Seluruh foto pada dokumen ini disumbangkan oleh: Mulyadi (TN Teluk Cenderawasih), Eril (TN Bantimurung Bulusaraung), Yuyun Saepul U. (TN Bunaken), Iskandar (TN Merapi), Duduy (TN Gn. Halimun Salak), Efan Ekananda (TN Tanjung Puting), TN Komodo.

Cover depan: TN Rinjani

Diterbitkan oleh Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat Jenderal KSDAE, Jakarta @2016

Daftar Isi

KATA PENGANTAR,	halaman ii
RINGKASAN EKSEKUTIF,	halaman iii
BAB I PENDAHULUAN,	halaman 1
BAB II STRATEGI PEMBANGUNAN KSDAE: Arah Kebijakan KSDAE Tahun 2017,	halaman 5
BAB III INDIKASI ANGGARAN,	halaman 9
BAB IV PENUTUP,	halaman 13
LAMPIRAN	



Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2017 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 20 September 2016
Direktur Jenderal KSDAE,

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

ii





Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2017 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.



Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan sembilan indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2017, sebagaimana pagu indikatif tahun 2017, direncanakan sebesar Rp. 1.980.940,834.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.

-Conservation Planner-



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2017 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.



Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Visi dan Misi

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.



RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***".

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun norma pembangunan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 (Nawa Cita).

-Conservation Planner-





BAB II

STRATEGI PEMBANGUNAN KSDAE

Arah Kebijakan KSDAE Tahun 2017

*“Ditjen KSDAE mendukung **8** dari **14** prioritas nasional Kementerian LHK pada RKP tahun 2017”*

Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.



Tujuan Pembangunan KSDAE adalah Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Ekosistem, Spesies dan Sumber Daya Genetik untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam hayati dan keseimbangan ekosistem untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

Melalui Sasaran Program:

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Tahun 2017 mekanisme pencapaian pembangunan mengalami perubahan, hal ini seiring dengan penerapan perencanaan yang tematik-holistik, integratif dan spasial. Pengelokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi ***money follow program***. Perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi).

Tahun 2017 Direktorat Jenderal KSDAE turut berperan dalam mensukseskan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN), 8 (delapan) Program Prioritas (PP) dan 12 (dua belas) Kegiatan Prioritas (KP). Kedelapan Prioritas Nasional tersebut yaitu Revolusi Mental, Kesehatan, Kedaulatan Energi, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata, Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, Ekspor Non Migas, dan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Pada pelaksanaannya, pencapaian program prioritas nasional ini diarahkan pada satker lingkup Ditjen KSDAE, sehingga satker yang menjadi lokus prioritas pelaksanaan pencapaian program prioritas nasional akan mendapatkan prioritas dalam pengalokasian anggaran.

1. Prioritas Nasional Revolusi Mental

Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Menurunnya gangguan dan ancaman di kawasan konservasi, dan 2) Meningkatnya peran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkualitas di kawasan konservasi. Sehingga Output prioritas yang terkait dengan Ditjen KSDAE adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi. Namun demikian, kegiatan lebih fokus pada preventif pengamanan kawasan, sedangkan untuk tindakan yustisi sudah menjadi tugas dan fungsi Ditjen Gakkum.



2. Prioritas Nasional Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai adalah Keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan. Dalam pelaksanaannya berupa kegiatan-kegiatan pencegahan dari bahaya terjadinya kebakaran hutan di kawasan konservasi.

3. Prioritas Nasional Kedaulatan Energi

Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro). Prioritas ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pemanfaatan energi air dan panas bumi pada kawasan konservasi mulai dari tahapan awal (persiapan, sosialisasi, dll) sampai implementasinya.

4. Prioritas Nasional Kemaritiman dan Kelautan

Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Terselenggaranya pengelolaan kawasan ekosistem esensial mangrove, 2) Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati, 3) Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut, 4) Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi pesisir dan laut, dan 5) Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut non taman nasional. Untuk prioritas ini dicapai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan mangrove, pembentukan dan pengoperasionalan KPHK, peningkatan nilai METT, peningkatan populasi spesies dan pengelolaan wisata bahari mulai dari tahap penyiapan desain tapak sampai pemenuhan sarana prasarana wisata.

5. Prioritas Nasional Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi, 2) Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi, 3) Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (Sanctuary) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di KK, 4) Pembangunan jaringan jalan akses wisata di dalam kawasan, dan 5) Pemenuhan fasilitas umum wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas Nasional destinasi wisata dan TWA. Prioritas pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional yang cukup mendapatkan perhatian yang serius dimana prioritas ini dicapai melalui kegiatan penyiapan objek wisata mulai dari tahap desain tapak sampai pemenuhan sarana prasarana, pembangunan sanctuary, pembangunan jalan akses wisata/transformasi dan pembangunan fasilitas umum.



6. Prioritas Nasional Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya bahan baku untuk industri berbasis *bioresources*. Pada Ditjen KSDAE penerapannya dengan pembinaan, pengawasan dan kontrol penangkaran dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

7. Prioritas Nasional Ekspor Non Migas

Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya nilai ekspor Tumbuhan Satwa Liar dan *Bioprospecting*, dan 2) Mengimplementasikan ketentuan dalam Protokol Nagoya dalam rangka memfasilitasi akses dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Prioritas ini dicapai melalui pembinaan pada pengusaha bidang tumbuhan dan satwa liar sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor TSL.

8. Prioritas Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar KK, 2) Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, 3) pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna, dan 4) Terintegrasinya zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1: 50.000 (*One Map Policy*) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat. Peran KSDAE adalah dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat/pemberdayaan pada desa-desa yang ada di sekitar kawasan konservasi baik berupa peningkatan kapasitas maupun bantuan bagi masyarakat.

-Conservation Planner-

BAB III

INDIKASI ANGGARAN

“PENGALOKASIAN ANGGARAN TIDAK LAGI MENGACU PADA MONEY FOLLOW FUNCTION, TETAPI TELAH BERTRANSFORMASI MENJADI MONEY FOLLOW PROGRAM”

Pagu indikatif Ditjen KSDAE Tahun 2017 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan). Sesuai dengan RKP 2017, pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp. 1.980.940,834.000,-. Indikasi anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi **money follow program** yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata.

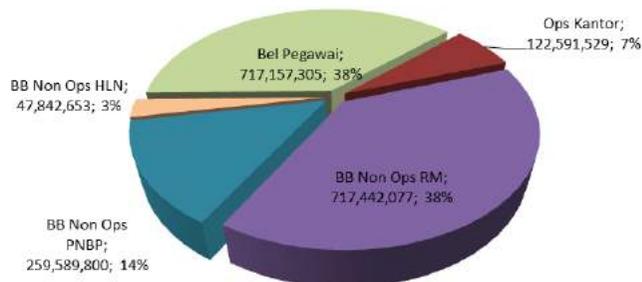


Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja. Sesuai dengan banyaknya target prioritas nasional pada Ditjen KSDAE, pagu 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga diharapkan pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih optimal dibandingkan tahun 2016 dimana anggaran 2016 banyak mengalami penghematan anggaran sehingga menyulitkan satker UPT dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi.

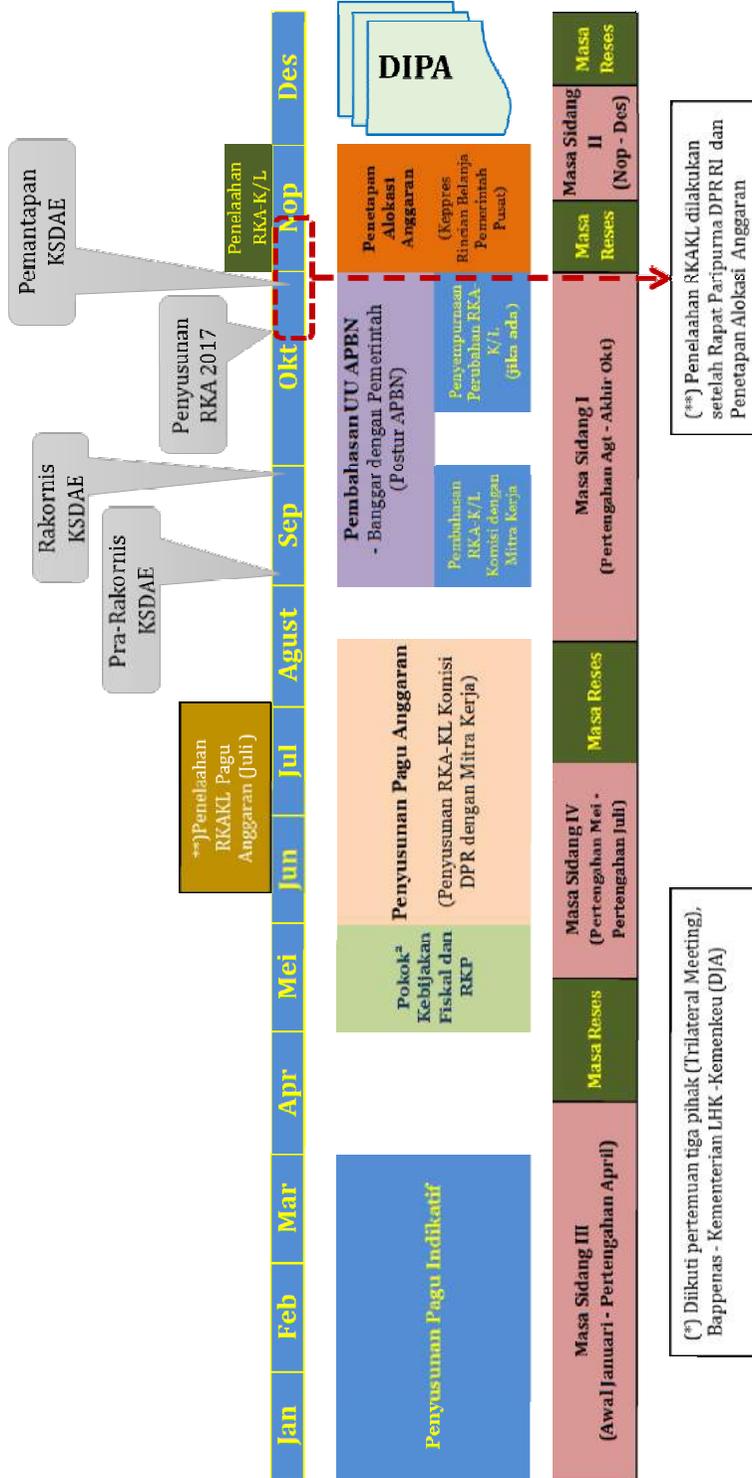
Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2017. Sesuai dengan *trilateral meeting* pagu indikatif Ditjen KSDAE sebesar Rp. 1.980.940,834.000,- namun dengan adanya kebijakan penghematan anggaran maka pagunya menjadi Rp. 1.864.623.364.000,- dengan rincian per jenis belanja sebagaimana Gambar 1 dibawah ini.

No.	Jenis Belanja	RM	PNBP	HLN	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	717.157.305	-	-	717.157.305	38%
2	Belanja Operasional	122.591.529	-	-	122.591.529	7%
3	Belanja Non OPS/Modal	717.442.077	259.589.800	47.842.653	1.024.874.530	55%
	Total Pagu Anggaran	1.557.190.911	259.589.800	47.842.653	1.864.623.364	100%
	% Per Sumber Dana	83%	14%	3%	100%	

Gambar 1. Komposisi anggaran 2017 per jenis belanja



Gambar 2. Grafik Komposisi anggaran 2017 per jenis belanja



Gambar 3. Tatawaktu penyusunan anggaran Ditjen KSDAE





BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2017 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Namun demikian, apabila sekiranya diperlukan penyempurnaan dikarenakan adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta Rancangan APBN Tahun 2017, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017, beserta seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, baik di pusat maupun di daerah.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan-pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

-Conservation Planner-





Lampiran Renja 2017







Lampiran 1

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2017

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					1.980.941,0				
1	Konservasi Spesies dan Genetik				13.500,0				
	Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Nilai ekspor TSL dan <i>Bioprospecting</i>		5,3 Trilyun	1.500,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	Pusat (Jakarta)
	Mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan, dan/atau pakan PRG bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumberdaya hayati dan perlindungan konsumen dari perdagangan internasional yang tidak adil	Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik		4 Produk Rekayasa Genetika (PRG)	1.200,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Pusat (Jakarta)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
s		Mengimplementasikan ketentuan dalam Protokol Nagoya dalam rangka memfasilitasi akses dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	4 <i>Prior Informed Consent</i> (PIC)	1.600,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Pusat (Jakarta)
		Peningkatan kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Jumlah kertas posisi Indonesia di Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati	4 Kerpos	800,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	1.700,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 spesies	700,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 unit	10 unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya PNBP dari hasil pemanfaatan TSL	Besara PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Rp. 10 M	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya data dan informasi sebarab keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi	7 wilayah biogeografi	1.700,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya sistem basis data balai kliring nasional	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik ditingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 unit	600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tercapai dan beroperasinya Suaka Satwa (Sanctuary) species terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) species terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	6 unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi				9.500,0				
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	30 dokumen RP	1.300,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30 unit	1.700,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	TWA Laut Pulau Moyo (NTB), SM Laut Pulau Rambut (Jakarta), TWA Laut Pulau Weh (Aceh), CA Krakatau (Lampung), TWA Teluk Yotefa (Papua), TWA Laut Tokobae (Sulteng), TWA Laut Pulau Kombo (Maluku), TWA Laut Pulau Marselu (Maluku), TWA Laut Pulau Kasa (Maluku), TWA Laut Satonda (NTB)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terpuhikannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000ha	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 desa	1.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 ha	1.200,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Pusat (Jakarta)
		Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 unit	1.100,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 provinsi	1.600,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pusat (Jakarta)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
3	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				10.000,0				
		Terintegrasinya zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	Jumlah data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 Kawasan Konservasi di 34 Provinsi	1.900,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Aceh: CA Pinus Jantho, CA Serbojadi; Sumut: CA Batu Gajah, CA Batu Ginurit, CA Dolok Tinggi Raja, CA Dolok Saut, CA Dolok Sipirok, CA Doal Sibual-buali, CA Liang Balik, CA Martelu Purba, CA Sibolangit; Sumbar: CA Batang Palupuh, CA Batang Pangean II, CA Beringin Sati, CA Lembah Anai, CA Lembah Harau, CA Rimbo Panti; Riau: CA Bukit Bungkuk, CA Pulau Berkeh; Jambi: CA Buluh Hitam/Pasir Mayang Danau Bangko, CA Cempaka/Tabir Kesajung, CA Durian Luncuk I, CA Durian Luncuk II, CA Gua Ulu Tiangko, CA Ht. Bakau Pantai Timur, CA Sungai Batar; Bengkulu: CA Pagar Gunung I, CA Pagar Gunung V, CA Pagar Gunung II, CA Pagar Gunung III, CA Pagar Gunung IV, CA Taba Penanjung I, CA Taba Penanjung II, CA Talang Ulu I, CA Talang Ulu II, CA Air Alas Reg. 103, CA Air Seblat Reg.89, CA Danau Dusun Besar Reg. 61, CA Danau Menghijau Reg. 56, CA Kioyo, CA Pasar Ngalam Reg.92, CA Pasar Talo Reg.93, CA S Bahewo Teluk Klowe, CA



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Tanjung Laksaha Reg.98; Lampung: CA Pulau Krakatau; Banten: CA Gunung Tukung Gede, CA Pulau Dua, CA Rawa Danau; DKI Jakarta: CA Pulau Bokor; Jawa Barat: CA Bojonglarang Jayanti, CA Cadas Malang, CA Cibanteng, CA Cigenteng Cipanyi, CA Dungus Iwul, CA Gunung Burangrang, CA Gunung Jagat, CA Gunung Papandayan, CA Gunung Simpang, CA Gunung Tangkuban Perahu, CA Gunung Tilu, CA Junghunh, CA Kawah Kamojang, CA Leuweung Sancang, CA Malabar, CA Nusa Gede Panjalu, CA Pananjung Pangandaran, CA Sukawayana, CA Takokak, CA Tangkuban Prahu Pelabuhan Ratu, CA Talaga Bodas, CA Telaga Patengan, CA Telaga Warna, CA Yanlapa; Jawa Tengah: CA Bantarbolang, CA Bekutuk, CA Cabak, CA Curug Bengkawah, CA Donoloyo, CA Gebugan, CA Gunung Butak, CA Gunung Celering, CA Karang Bolong, CA Kecubung Uolanang, CA Keling I, CA Keling II/III, CA Kembang, CA Moga, CA Nusakambangan Barat, CA Nusakambangan Timur, CA Pager Wunung Darupono, CA



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Pantodomas, CA Peson Subah I, CA Peson Subah II, CA Pringombo I, CA Pringombo II, CA Sepakung, CA Jatinegara, CA Telogo Dringo, CA Telogo Ranjeng, CA Telogo Sumurup, CA Wijaya Kusuma; DI Yogyakarta: CA Gunung Batu Gamping, CA Mangunan/Imogiri; Jawa Timur: CA Besowo Gadungan, CA Ceding, CA Curah Manis Sempolan (I-VIII), CA Gowa Nglirip, CA Gunung Abang, CA Gunung Picis, CA Gunung Sigogor, CA Janggangan Rogojampi I, CA Janggangan Rogojampi II, CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup, CA Manggis Gadungan, CA Pancur Ijen I, CA Pancur Ijen II, CA Pulau Bawean, CA Pulau Noko, CA Pulau Nusa, CA Pulau Nusa Barung, CA Saobi, CA Pulau Sempu, CA Sungai Kolbu Iyang Plateu, CA Watangan Puger I-VI; Bali: CA Batukahu I, CA Batukahu II, CA Batukahu III; NTB: CA Pedauh, CA Toffo Kota Lambu, CA Pulau Sangiang, CA Pulau Panjang; NTT: CA Gunung Mutis, CA Kemang Boleng I, CA Kemang Boleng II, CA Hutan Bakau Maubesi, CA Ndeta Kelikima, CA Riung, CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado; Kalbar: CA



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Nyiu Panrissen, CA Lo Fat Fun Fie, CA Mandor, CA Gunung Raya Pasi, CA Muara Kendawangan; Kalimantan Tengah: CA Bukit Tangkiling, CA Pararawen I/II, CA Bukit Sapat Haung, CA Gunung Kentawan, CA Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku, CA Teluk Pamanukan, CA Sungai Bulan dan Sungai Lulan; Kalimantan Timur: CA Muara Kaman Sedulang, CA Padang Luwai, CA Teluk Apar, CA Teluk Adang; Sulawesi Utara: CA Gunung Dua Saudara, CA Gunung Ambang, CA Gunung Lokon, CA Gunung Tangkoko Batuangus; Gorontalo: CA Mas Popaya Raja, CA Panua, CA Tangale, CA Tanjung Panjang; Sulteng: CA Gunung Dako, CA Gunung Sojol, CA Gunung Tinombala, CA Morowali, CA Pamona, CA Pangi Binangga, CA Tanjung Api; Sulsel: CA Faruhumpenai, CA Kalaena, CA Ponda-ponda; Sultra: Kakenauwe, CA Lamedae, CA Napabalano; Maluku: CA Gunung Sibela, CA Lifamatola, CA Pulau Obi, CA Pulau Seho, CA Tobalai, CA Taliabu; Maluku: Bekau Huhun, CA Gunung Api Kisar, CA Pulau Angwarmase, CA Pulau Nustaram, CA Pulau</p>



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Nuswotar, CA Pulau Pombo, CA Tanjung Sial; Papua Barat: CA Pegunungan Kumawa, CA Pegunungan Arfak, CA Pegunungan Fakfak, CA Pegunungan Wondiboy, CA Pulau Bantata Barat, CA Pulau Kofiau, CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati Utara, CA Pegunungan Tamrau Selatan, CA Pegunungan Tamrau Utara, CA Teluk Bintuni, CA Pulau Waigeo, CA Wagura Kote, CA Pantai Sausapor; Papua: CA Biak Utara, CA Bupul, CA Pegunungan Cycloops, CA Enarotali, CA Pegunungan Wayland, CA Pegunungan Yapen Tengah, CA Pulau Supiori, CA Tanjung Wiay; Lampung: CAL Bukit Barisan Selatan, CAL Pulau Anak Krakatau; Jawa Barat: CAL Pananjung Pangandaran, CAL Leuweung Sancang; Kalbar: CAL Karimata; Papua Barat: CAL Pulau Kofiau; Aceh: KSA/KPA Calon Tahura Subulussalam, KSA/KPA Calon Tahura Simeulue, KSA/KPA Calon TWA Kuta Malaka; Sumut: KSA/KPA Lubuk Raya, KSA/KPA Sei Ledong; Sumbar: KSA/KPA Air Putih, KSA/KPA Air Tarusan, KSA/KPA Arau Hilir, KSA/KPA Barisan 1, KSA/KPA Batang Pangean 1, KSA/KPA Gunung Marapi.</p>



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									KSA/KPA Gunung Sago, KSA/KPA Malampah Alahan Panjang, KSA/KPA Maninjau Utara-Selatan, KSA/KPA Pagai Selatan, KSA/KPA Saibi Sarabua, KSA/KPA Singgalang Tandikat; Riau: KSA/KPA Buluh Cina, KSA/KPA Mahato; Babel: KSA/KPA Gunung Lalang, KSA/KPA Gunung Mankol, KSA/KPA Gunung Maras, KSA/KPA Gunung Menumbing, KSA/KPA Gunung Permisan, KSA/KPA Jering Menduyung; Lampung: KSA/KPA Rawa Kandis; NTB: KSA/KPA Jereweh; Kalteng: KSA/KPA Ex PLG I, KSA/KPA Ex PLG II, KSA/KPA Ex PLG III, KSA/KPA Ex PLG IV, KSA/KPA Ex PLG V, KSA/KPA S. Sebangau; Kalsel: KSA/KPA Asam Asam, KSA/KPA Batu Tunau-Tanjung Pengharapan; Sulut: KSA/KPA Calon Tahura Gunung Tumpa; Sulbar: KSA/KPA Calon TN Ganda Dewata, KSA/KPA Calon Tahura Messawa; Maluku: KSA/KPA Daab, KSA/KPA Gunung Sahuwai, KSA/KPA Masbait, KSA/KPA Tafermaar, KSA/KPA Pulau Larat, KSA/KPA Sungai Niff, KSA/KPA Danau Tihu; Papua Barat: KSA/KPA Tuwanwowi; Papua: KSA/KPA Mapia; Aceh: SM Rawa Singkil; Sumut: SM



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Barumon, SM Dolok Surungan, SM Karang Gading/Langkat Timur Laut, SM Siranggas; Riau: SM Balai Raja, SM Bukit Batu, SM Bukit Rimbang-Bukit Baling, SM Danau Pulau Besar/Danau Bawah, SM Giam Siak Kecil, SM Kerumutan, SM PLG Sibanga, SM Tasik Belat, SM Tasik Besar/Tasik Metas, SM Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung, SM Tasik Tanjung Padang; Sumsel: SM Bentayan, SM Dangku, SM Gumai Pasemah, SM Gunung Raya, SM Isau-Isau Pasemah, SM Padang Sugihan; DKI Jakarta: SM Muara Angke, SM Pulau Rambut dan Perairan dsk.; Jawa Barat: SM Cikepuh, SM Gunung Sawal, SM Sindangkerta; Jateng: SM Gunung Tunggangan; DIY: SM Paliyan, SM Sermo; Jatim: SM Dataran Tinggi Iyang, SM Pulau Bawean; NTT: SM Kateri, SM Harlu, SM Danau Tuadale, SM Perhatu, SM Ale Aisio; Kalteng: SM Lamandau; Kalsel: SM Pulau Kaget, SM Kuala Lupak, SM Pleihari Tanah Laut; Kaltim: SM Pulau Semama; Sulut: SM Gunung Manembo-nembo, SM Karakelang Utara, SM Karakelang Selatan; Gorontalo: SM Nantu;



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Sulteng: SM Bakiriang, SM Lombuyan, SM Pati pati, SM Pinjan/Tanjung Matop, SM Pulau Dolangan, SM Tanjung Santigi; Sulsel: SM Komara; Sultra: SM Buton Utara, SM Lamбусango, SM Tanjung Amolengo, SM Tanjung Batikolo, SM Tanjung Peropa; Maluku: SM Pulau Baun, SM Pulau Kobror, SM Tanimbar, SM Pulau Manuk, SM Pulau Kasa; Papua Barat: SM Muhrani-Kaironi, SM Sidei- Wiban, SM Pulau Venu; Papua: SM Danau Bian, SM Pulau Pombo, SM Mambramo Foja, SM Pegunungan Jayawijaya, SM Pulau Dolok, SM Pulau Komolon, SM Savan; Papua Barat: SML Pulau Sabuda & Pulau Tataruga; Aceh: TB Lingga Isaq; Sumut: TB Pulau Pini; Kep. Riau: TB Pulau Rempang; Bengkulu: TB Gunung Nanu'ua, TB Semidang Bukit Kabu; Jawa Barat: TB Masjid Kareumbi; NTB: TB Pulau Moyo; NTT: TB Dataran Bena, TB Pulau Ndana; Sulteng: TB Landusa Tomata; Sulsel: TB Komara; Aceh: THR Pocut Meurah Intan; Sumut: THR Bukit Barisan; Sumbar: THR Dr. Mohammad Hatta; Riau: THR Minas (Sultan Syarif Kasim); Jambi: THR Sekitar



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Tanjung/Orang Kayo Hitam, THR Sultan Thaha Syaifuddin; Bengkulu: THR Bukit Rabang-Gluguran, THR Raja Lelo (Pungguk Menakat); Lampung: THR Wan Abdul Rachman; Banten: THR Banten; Jabar: THR Ir. H. Djuanda, THR Pancoran Mas Depok, THR Gunung Palasari-Gunung Kunci; Jawa Tengah: THR KGPAA Mangkunegoro I; DIY: THR Gunung Bunder; Jatim: THR R. Soeryo; Bali: THR Ngurah Rai; NTB: THR Nuraksa; NTT: THR Prof. Ir. Herman Johannes; Kalsel: THR Sultan Adam; Kaltim: THR Bukit Soeharto, THR Lati Petangis; Sulteng: THR Sulteng; Sulsel: THR Sinjai/Abdul Latief, THR Bontobahari; Sultra: THR Murhum/Nipa-Nipa; Aceh, Sumut: TN Gunung Leuser; Sumut: TN Batang Gadis; Sumbar: TN Siberut; TN Riau: TN Tesso Nilo; Riau, Jambi: TN Bukit Tigapuluh; Sumbar, Bengkulu: TN Kerinci Seblat; Jambi: TN Berbak, TN Bukit Duabelas; Sumsel: TN Sembilang; Bengkulu, Lampung: TN Bukit Barisan Selatan; Lampung: TN Way Kambas; Banten: TN Ujung Kulon; Banten, Jawa Barat: TN Gunung Halimun Salak;</p>



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Jawa Barat: TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai; Jateng: TN Gunung Merbabu; Jateng&DIY: TN Gunung Merapi; Jawa Timur: TN Baluran, TN Bromo Tengger Semeru, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo; Bali: TN Bali Barat; NTB: TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora; NTT: TN Manupeu Tanah Daru, TN Laiwangi Wanggameti, TN Kelimutu, TN Komodo; Kalbar: TN Danau Sentarum, TN Gunung Palung, TN Betung Kerihun; Kalbar, Kalteng: TN Bukit Baka Bukit Raya; Kalteng: TN Sebangau, TN Tanjung Puting; Kaltim, Kaltara: TN Kayan Mentarang; Kaltim: TN Kutai; Sulut&Gorontalo: TN Bogani Nani Wartabone; Sulteng: TN Lore Lindu; Sulsel: TN Bantimurung-Bulusaraung; Sultra: TN Rawa Aopa Watumohai; Maluku: TN Aketajawe Lolobata; Maluku: TN Manusela; Papua: TN Lorentz, TN Wasur; DKI Jakarta: TNL Kepulauan Seribu; Jateng: TNL Kepulauan Karimun Jawa; Sulut: TNL Bunaken; Sulteng: TNL Kepulauan Togeang; Sultra: TNL Wakatobi; Papua Barat: TNL Teluk Cendrawasih; Aceh: TWA



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Pulau Weh, TWA Jantho, TWA Kepulauan Banyak; Sumut: TWA Deleng Lancuk, TWA Holiday Resort, TWA Lau Debuk-debuk, TWA Sibolangit, TWA Sicikeh-cikeh, TWA Sijaba Huta Ginjang; Sumbar: TWA Lembah Harau, TWA Mega Mendung, TWA Rimbo Panti; Riau: TWA Sungai Dumai; Jambi: TWA Bukit Sari; Sumsel: TWA PLG Bukit Serelo, Pundi Kayu; Bengkulu: TWA Air Hitam Reg.102, TWA Air Ketebat Danau Tes Reg.57, TWA Air Rami I/II Reg.87, TWA Bukit Kaba, TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran, TWA Muko-Muko, TWA Pantai Panjang Pulau Baai Reg.91, TWA Seblat, TWA Way Hawang Reg.95; Banten: TWA Pulau Sangiang; DKI Jakarta: TWA Angke Kapuk; Jabar: TWA Cimanggu, TWA Gunung Guntur, TWA Gunung Pancar, TWA Gunung Papandayan, TWA Gunung Tampomas, TWA Jember, TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu, TWA Kawah Kamojang, TWA Linggarjati, TWA Pananjung Pangandaran, TWA Sukawayana, TWA Talaga Bodas, TWA Telaga Patengan, TWA Telaga Warna; Jateng: TWA Grojogan Sewu, TWA Sumber Semen, TWA Gunung



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Selok, TWA Telogo Warno/Telogo Pengilon, TWA Guci; DIY: TWA Gunung Batu Gamping; Jatim: TWA Tretes, TWA Gunung Baung, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup- Ungup; Bali: TWA Panelokan, TWA Sangeh, TWA Danau Buyan-Banau Tamblingan, TWA Gunung batur Bukit Payang; NTB: TWA Suranadi, TWA Pekalangan, TWA Kerandangan, TWA Bangko- Bangko, TWA Gunung Tunak, TWA Semongkat, TWA Tanjung Tumpa, TWA Danau Rawa Taliwang, TWA Madapangga; NTT: TWA Tuti Adagae, TWA Manipo, TWA Ruteng, TWA Bipolo, TWA Camplong, TWA Egon Limedo, TWA Pulau Lapang, TWA Pulau Batang, TWA Baumata, TWA Pulau Rusa, TWA Sisimeni Sanam, TWA Tujuh Belas Pulau; Kalbar: TWA Baning, TWA Bukit Kelam Komplek, TWA Sungai Liku, TWA Tanjung Belimbing, TWA Asuansang, TWA Dungan, TWA Gunung Melintang; Kalteng: TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung keluang; Kalsel: TWA Pulau Kembang, TWA Pulau Bakut; Sulut: TWA Batu Angus, TWA Batu Putih; Sulteng: TWA Pulau Pasoso, TWA Pulau



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Tokobae, TWA Bancea, TWA Wera; Sulsel: TWA Cani Sirenreng, TWA Danau Mahalona, TWA Danau Matano, TWA Danau Towuti, TWA Lejja, TWA Malino, TWA Nanggala III, TWA Sidrap; Sultra: TWA Kepulauan Padamarang, TWA Mangolo, TWA Tirta Rimba/Air Jatuh; Maluku: TWA Gunung Api Banda; Papua Barat: TWA Beriat, TWA Gunung Meja, TWA Kalmono, TWA Sorong; Papua: TWA Nabire, TWA Teluk Youtefa; Aceh: TWAL Pulau Weh; Banten: TWAL Sangiang; NTB: TWAL Pulau Moyo, TWAL Pulau Satonda; NTT: TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere, TWAL Teluk Kupang; Kaltim: TWAL Pulau Sangalaki; Sultra: TWAL Teluk Lasolo; Maluku: TWAL Pulau Lombo, TWAL Pulau Marsegu, TWAL Pulau Kasa
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 unit	1.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 paket data	2.200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	800,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	1.400,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	2.200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				11.500,0				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	2,500,000 orang	3.200,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	1.500 Kwatt	1.500,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	5 Unit	1.700,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Pusat (Jakarta)
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi kawasan konservasi minimal 25 unit	5 unit	900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK	2 KK	2.600,0				
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial				6.500,0				
	Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa)	4.600	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pulau Rupa Riau, Labuan & Meringgai Kabupaten Lampung Timur, Jaringhalu Sumatera Utara, Tanjung Jabung Timur Jambi, Pemalang Jawa Tengah, Teluk Pangpang (Jatim)	
		Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	13 KEE	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		
	Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	14 paket data	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		
	Terbentuknya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direview sebanyak 48 dokumen	14 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		
	Terbentuknya kawasan ekosistem karst yang ditetapkan pengelolaannya	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	2 kawasan	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		
	Tersedianya koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasi	Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	100	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem				61.900,0				
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77,5 poin	77,5	61.900,0				
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati				839.849,0				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.000.000 orang	18.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TWA Guntur (Jawa Barat), TWA Papandayan (Jawa Barat), TWA Gunung Tunak (NTB), TWA Kawah Ijen (Jawa Timur), TWA Pulau Weh (NAD), TWA Air Putih (Bengkulu), TWA Muka Kuning (Riau), TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TWA Tretes (Jawa Timur)
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di KK non TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di kawasan konservasi non taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Ciwidey (Owa Jawa) Jawa Barat, Samboja (Orangutan) Kalimantan Timur, Tarjun (Bekantan) Kalimantan Selatan, Sumatera Utara (Harimau Sumatera), Aceh (Gajah) NAD, Kamojang (Elang Jawa) Jawa Barat,
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	10 Kawasan Konservasi	5.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Regional Sumatera: KSPN Weh dsk. (TWA Pulau Weh), KSPN Danau Toba (Aek Nauli), KSPN Batam (TWA Muka Kuning) Regional Jawa Bali Nusra: KSPN Bromo Tengger Semeru (TWA Gunung Baung, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes), KSPN Labuan Bajo (TWA



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Rutung, TWA 17 Pulau Riung), KSPN Kep. Seribu (TWA Angke Kapuk), TWA Guntur, TWA Papandayan, TWA Gunung Tunak Regional Sulawesi Maluku: TWA Batu Putih
		Keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi non taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di kawasan konservasi non taman nasional yang terbakar maksimal 10.908 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 12.120 Ha)	Maksimum 10.908 Ha	30.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	27 Unit KSDA di Seluruh Indonesia
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan TWA	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TWA	125 km	12.500,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	TWA Guntur (Jawa Barat), Papandayan (Jawa Barat), Gunung Tunak (NTB), Kawah Ijen (Jawa Timur), Pulau Weh (NAD), Air Putih (Bengkulu), Muka Kuning (Riau), Gunung Baung (Jawa Timur), Tretes (Jawa Timur)
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TWA	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional	10 paket (dibreakdo wn per paket)	46.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	TWA Guntur (Jawa Barat), Papandayan (Jawa Barat), Gunung Tunak (NTB), Kawah Ijen (Jawa Timur), Pulau Weh (NAD), Air Putih (Bengkulu), Muka Kuning (Riau), Gunung Baung (Jawa Timur), Tretes (Jawa Timur)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut non taman nasional	Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	18 Unit Kawasan Konservasi	18.480,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	CAL Bukit Barisan Selatan (Lampung), CAL P. Anak Krakatau (Lampung), CAL Pananjung Pangandaran (Jawa Barat), CAL Leuweung Sancang (Jawa Barat), CAL Karimata (Kalbar), CAL P. Kofiau (Papua Barat), SML P. Sabuda & P. Tataruga (Papua Barat), TWAL P. Weh (Aceh), TWAL Sangiang (Banten), TWAL P. Moyo (NTB), TWAL P. Satonda (NTB), TWAL Gugus P. Teluk Maumere (NTT), TWAL Teluk Kupang (NTT), TWAL Pulau Sangalaki (Kaltim), TWAL Teluk Lasolo (Sulawesi Tenggara), TWAL P. Pombo (Maluku), TWAL P. Marsegu (Maluku), TWAL P. Kasa (Maluku)
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	10 unit	5.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	KPHK Moyo (NTB), KPHK Jakarta (DKI Jakarta), KPHK Kep. Krakatau (Lampung), KPHK Pangandaran Sancang (Jawa Barat), KPHK Riung & Maumere (NTT), KPHK Kep. Karimata (Kalimantan Barat), KPHK Gn. Api Banda (Maluku), KPHK Pulau Weh (NAD), KPHK Seram Barat (Maluku), KPHK Kep. Banyak (Aceh)
		Meningkatnya kontribusi TWA dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari TWA	500 Kwatt	25.000,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TWA Lejja (Sulawesi Selatan), TWA Cani Sirenreng (Sulawesi Selatan)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35 unit	225,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Regional Sumatera: KPHK Sungai Dumai (Riau), KPHK Pantai Panjang (Bengkulu) Regional Jawa Bali Nusra: KPHK Pangandaran Sancang (Jabar), KPHK Pulau Sempu (Jatim), KPHK Bawean-Noko Nusa (Jatim), KPHK Pulau Saobi (Jatim) Regional Kalimantan: KPHK Tanjung Keluang (Kalteng), KPHK Selat Sebuku (Kalsel), KPHK Teluk Kelumpang (Kalsel), KPHK Kep. Karimata (Kalbar)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	2%	915,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	P. Sangalaki dan P. Derawan Kab. Berau (Kaltim), SM Cikepuh (Jawa Barat), Kab. Sambas (Kalbar), Raja Ampat (Papua Barat)
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	5 Unit	5.444,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Regional Sumatera: CA Malampah Alahan; Regional Jawa Bali Nusra: CA Kawah Kamojang (Jawa Barat), CA Gunung Simpang, CA Talaga Bodas (Jabar), TWA Danau Buyan (Bali)
		Tersedianya arahan pengelolaan/pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi non TN (blok pengelolaan) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan	Jumlah penataan blok pengelolaan kawasan konservasi non TN sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	413 Kawasan Konservasi Non- Taman Nasional	8.776,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	413 Kawasan Konservasi Non TN di 31 Provinsi



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		hidup dan penerapan teknologi tepat guna							
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi non TN	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	27 desa	29.600,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Kawasan Konservasi- Nama Desa SM Dolok Surungan-Lobu Rappa (Sumut), CA Papandayan-Sukalila (Jawa Barat), TWA Kawah Ijen- Taman Sari (Jawa Timur), CA Mutis-Fatumnasi (NTT), CA Cyclop-Kampung Maribu (Papua), TWA Sorong- Kampung Klasaman (Papua Barat), TWA/CA Jantho-Jalin (NAD), KSA Marapi-Nagari Batu Palano (Sumbar), CA. Durian Luncuk I-Guruh Baru (Jambi), SM Padang Sugihan- Sebokor (Sumsel), CA dan CAL Kep Krakatau-Tejang Pulau Sebesi (Lampung), TWA Seblat-Suka Baru (Bengkulu), SM Pulau Rambut-Kelurahan P Untung Jawa (DKI Jakarta), CA Bantarbolang-Kebongede (Jateng), SM Paliyan-Karang Asem (DI.Yogya), CA Batukahu dan TWA D.Buyan- D.Tamblingan-Candikuning (Bali), TWA Gunung Tunak- Mertak (NTB), CA Gunung Nyiut-Pisak (Kalbar), TWA Bukit Tangkiling-Kel. Banturung (Kalteng), CA Teluk Pamukan-Sakadoyan (Kalsel), CA Teluk Adang-Muara Paser



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									(Kaltim), TWA Wera-Balumpewa (Sulteng), SM Tanjung Amolengo-Ulunese (Sultra), CA Dudasudara-Kelurahan Danowudu (Sulut), SA Gunung Sahuwai-Desa Ariate (Maluku), SM Karang Gading Langkat Timur Laut-Jaring halus (Sumut)
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional	Presentase gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian	Maksimum 125 kejadian	37.500,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	26 Unit KSDA di Seluruh Indonesia
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	26 unit	2.000	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	26 Unit KSDA di Seluruh Indonesia
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke Luar Negeri bersertifikat	30 unit	3.000,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	Jawa Barat (5 unit), Jawa Timur (5 unit), Jawa Tengah (5unit), Papua (1 unit), Bali (5 unit), DKI (5 unit), DIY (2 unit), Kalbar (2 unit)
		Tersedianya bahan baku untuk industri berbasis tumbuhan dan satwa liar (TSL)/ <i>bioresources</i>	Produksi hasil penangkaran TSL dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c) Herpetofauna 3.500.000 ekor	6004500 ekor/pcs	11.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	24 Provinsi: Jabar, Jatim, Jateng, DIY, DKI Jakarta, Bali, Sumut Lampung, Jambi, Bengkulu, Riau, NAD, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat
			Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor ; c) Amphibia 83.839.375 ekor; d) Burung 7.695 ekor ; e) Arthropoda 70.435 ekor; f) Anthozoa	6004500 ekor/pcs	13.200,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Seluruh Indonesia



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000 ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs						
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		5.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013		1.500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	240	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	160	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	1.500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya PNPB dari hasil pemanfaatan TSL	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	1.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit	1.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 unit	1.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	600	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut (Renja Aplikasi)	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35	105.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 unit	400	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	409.459	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
8	Pengelolaan Taman Nasional				1.028.192,0				
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.500.000 orang	147.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Komodo (NTT), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), TN Tanjung Putting (Kalimantan Tengah), TN Rinjani (NTB), TN Bali Barat (Bali), Tn Alas Purwo (Jawa Timur), TN Ciremai (Jawa Barat), TN BBS (Lampung), TN Way Kambas (Lampung), TN Ujung Kulon (Jawa Barat), TNKS (Jambi), TN Siberut (Sumatera Barat)	
	Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TN. Bantimurung Bulusaraung (Tarsius) Sulawesi Selatan, TN Bukit Barisan Selatan (Harimau Sumatera) Lampung, TN LoreLindu (Maleo) Sulawesi Tengah, TN. Manusela (Kakatua Besar Jambul Kuning) Maluku, TN. Kep. Seribu (Penyu) DKI Jakarta, TN Komodo (Komodo) NTT	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	14 TN	7.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Regional Kalimantan: KSPN Tanjung Puting dsk. (TN Tanjung Puting) Regional Jawa Bali Nusra: KSPN Rinjani dsk. (TN Rinjani), KSPN Bali Barat dsk. (TN Bali Barat), KSPN Ijen dsk. (TN Alas Purwo), KSPN Tanjung Lesung dsk. (TN Ujung Kulon), KSPN Bromo dsk. (TN Bromo Tengger Semeru), KSPN Kepulauan Seribu (TN Kepulauan Seribu), TN Ciremai, KSPN Merapu-Merbabu (TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu), KSPN Komodo dsk. (TN Komodo), KSPN Ende Kelimutu (TN Kelimutu) Regional Sumatera: KSPN Kerinci Seblat dsk. (TNKS), KSPN Siberut dsk. (TN Siberut), TN BBS, TN Way Kambas Regional Sulawesi Maluku: KSPN Wakatobi (TN Wakatobi)
		Keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di taman nasional yang terbakar maksimal 39.524 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 43.915 Ha)	Maks. 39.524 Ha	48.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	51 Unit TN di Seluruh Indonesia



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan Taman Nasional	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TN	165.8 km	16.580,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	TN Alas Purwo 40,8 Km (Jawa Timur); TN BTS 21,5 Km (Jawa Timur); TNGHS 38,5 Km (Jawa Barat); TN Baluran 27 Km (Jawa Timur); TN GGP 20 Km (Jawa Barat); TN Bali Barat 18 Km (Bali)
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas Nasional destinasi wisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional destinasi wisata	4 paket (TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kep. Seribu, TN. BTS)	47.600,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	TN Komodo (NTT), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Kep. Seribu (DKI Jakarta), TN. Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur)
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari Taman Nasional	1000 Kwatt	12.500,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	TN Gunung Leuser (Aceh-Sumut), TN Bogani Nani Watabone (Gorontalo), TN Kerinci Seblat (Jambi), TN Laiwangi (NTT), TN Manupeu (NTT), TNG Halimun Salak (Jawa Barat), TN BBS (Lampung)
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasional laut	Jumlah unit kawasan taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	15 Unit	17.989,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Teluk Cendrawasih, TN Kepulauan Togeana, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN Manusela
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	20 Taman Nasional	15.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata	Konservasi pesisir dan laut	TN Komodo (NTT), TN Meru Betiri (Jawa Timur), TN Cendrawasih (Papua Barat), TN Kepulauan Togeana (Sulawesi Tengah), TN Ujung



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
							Bahari		Kulon (Banten), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Bunaken (Sulawesi Utara), TN Takabonerate (Sulawesi Selatan), TN Karimun Jawa (Jawa Tengah), TN Siberut (Sumatera Barat), TN Bali Barat (Bali), TN Alas Purwo (Jawa Timur), TN Baluran (Jawa Timur), TN Manusela (Maluku), TN Tanjung Puting (Kalimantan Tengah), TN Way Kambas (Lampung), TN Wasur (Papua), TN Lorentz (Papua), TN Kutai (Kalimantan Timur)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	2%	35.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	TN Meru Betiri (Jawa Timur), TN Teluk Cendrawasih (Papua Barat), TN Taka Bonerate (Sulawesi Selatan), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Bunaken (Sulawesi Utara), TN Karimunjawa (Jawa Tengah), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara)
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Taman Nasional	5 Unit	3.323,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Regional Sumatera: TN BBS (Bengkulu), TN Kerinci Seblat (Jambi), Regional Jawa Bali Nusra: TN Ciremai (Jabar), TN Halimun Salak (Jabar), TN Rinjani (NTB)



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar TN	Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	51 desa	46.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	TN Gunung Leuser-Namo Sialang, TN Gn Gd Pangrango-Cihanjawa, TN Kerinci Seblat-Lubuk Gadang Selatan, TN Lore Lindu-Bunga, TN BBS-Margomulyo, TN Betung Kerihun-Banua Tengah, TN BTS-Ranupane, TN Siberut-Matotonan , TN Bukit Tigapuluh-Rantau Langsat, TN Berbak-Air Hitam Laut, TN Way Kambas-Braja Harjosari, TN Halimun Salak-Cikiray, TN Ujung Kulon-Kertajaya, TN Baluran-Wonorejo, TN Alas Purwo-Kalipait , TN Meru Betiri-Wonoasri, TN Bali Barat-Sumber klampok, TN Gn. Rinjani-Sambik Elen, TN Komodo-Komodo, TN Kelimutu-Pemo, TN Bukit Baka Bukit Raya-Belaban Ella, TN Gn. Palung-Sejahtera, TN Tanjung Putting-Teluk Pulai, TN Kutai-Kandolo, TN Rawa Aopa Watumohai-Wonua Morome, TN Boganinani Wartabone-Tunggulo, TN Manusela-Kanikeh, TN Wasur-Kampung Yanggandur, TN Kayan Mentarang-Pa Umung, TN Batang Gadis-Pagar Gunung, TN Manupeu Tanah Daru-Katikuloku, TN Laiwangi Wanggameti-Nangga, TN Akatejawe Lolobata-Koli, TN Lorentz-Putagaima, TN Sebangau-Mekartani, TN Bukit Duabelas-Pematang Kabau, TN Teso-Air Hitam, TN Gunung Merapi-Ngargomulyo, TN Gunung Merbabu-Dusun Cuntel, TN Gunung Ciremai-Sagara Hiang, TN Bantimurung B-Tompobulu, TN Sembilang-Tabalaya, TN Danau Sentarum-Laut



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	250.000 ha (47 desa)	33.500,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	TN Gunung Leuser-Batu Rongring, TN Gn Gd Pangrango-Gekbrong, TN Lore Lindu-Tuva, TN Lore Lindu-Wuasa, TN BBS-Tebing Rambutan, TN Betung Kerihun-Tanjung Lasa, TN Bromo, TN Semeru-Duwet Krajan, TN Siberut-Mongan Poula, TN Bukit Tigapuluh-Muara Danau, TN Berbak-Simpang Datuk, TN Berbak-Kelurahan Tanjung, TN Way Kambas-Rantau Jaya Udik II, TN Halimun Salak-Cirompang, TN Ujung Kulon-Cibadak, TN Baluran-Sumberwaru, TN Alas Purwo-Wringin Putih, TN Meru Betiri-Andongrejo, TN Bali Barat-Kelurahan Gilimanuk, TN Bali Barat-Kelurahan Blimbingsari, TN Gunung Rinjani-Lenek Duren, TN Komodo-Pasir Panjang, TN Komodo-Papagarang, TN Kelimutu-Niowula, TN Bukit Baka Bukit Raya-Rantau Malam, TN Gunung Palung-Sedahan jaya, TN Tanjung Putting-Sungai Perlu, TN Kutai-Swargabara, TN Rawa Aopa Watumohai-Lantari, TN Boganinani Wartabone-Pinogaluman, TN Manusela-Piliana, TN Kayan Mentarang-Pa Padi, TN Batang Gadis-Hutabaringin Maga, TN Manupeu Tanah Daru-



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Umamanu, TN Laiwangi Wanggameti-Praingkareha, TN Sebangau-Habaring Hurung, TN Sebangun-Sebangau Mulya, TN Sebangau- Kereng Bangkirai, TN Bukit Duabelas- Bukit Suban, TN Tesonilo- Lubuk Kambang Bunga, TN Tesonilo-Gunung Melintang, TN Tesonilo-Situgal, TN Gunung Merapi-Wonodoyo, TN Gunung Ciremai- Padabeuhangar, TN Gunung Ciremai-Argalingga, TN B. Bulusarung-Labuaja, TN Sembilang-Karangsari, TN Danau Sentarum-Leboyan
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi TN (zonasi) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan taman nasional sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	3 TN	3.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Tambora (NTB) dan TN Batang Gadis (Sumatera Utara)
		Menurunnya gangguan pada kawasan taman nasional	Persentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian	Maksimum 124 kejadian	90.000,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	51 Unit TN di Seluruh Indonesia
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	51 unit	5.000	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	51 Unit TN di Seluruh Indonesia



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.100	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	10 Dokumen	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	250	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	2.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	700	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	750	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	1.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77,5 poin	77,5	453.800	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	



Lampiran 2

MATRIK STRUKTUR PENCAPAIAN IKK DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
VI	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				
1	Konservasi Spesies dan Genetik				
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Nilai ekspor TSL dan <i>Bioprospecting</i>	5,3 Trilyun	051. Penyusunan NSPK 052. Koordinasi Penentuan Harga Patokan TSL 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Pelaksanaan Konvensi CITES 056. Monitoring dan Evaluasi
		Mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan, dan/atau pakan PRG bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumberdaya hayati dan perlindungan konsumen dari perdagangan internasional yang tidak adil	Jumlah hasil <i>assesment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 Produk Rekayasa Genetika (PRG)	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Assesment Aman Lingkungan PRG 055. Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG 056. Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati 057. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Mengimplementasikan ketentuan dalam Protokol Nagoya dalam rangka memfasilitasi akses dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	4 Prior Informed Consent (PIC)	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Monitoring dan Evaluasi
		Peningkatan kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Jumlah kertas posisi Indonesia di Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati	4 Kerpos	051. Koordinasi dan Konsultasi 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Diseminasi dan Penyebarluasan Informasi 054. Perundingan Internasional
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dan Peningkatan Populasi Spesies 055. Perencanaan dan Evaluasi 056. Pengelolaan Database Species Prioritas 057. Pelaksanaan Konvensi Non CITES 058. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 spesies	051. Penyusunan NSPK 052. Pengembangan Sistem Tukar Menukar Satwa Antar LK 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Monitoring dan Evaluasi
		Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 unit	10 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Assesment Penangkaran 055. Audit Penangkaran 056. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya PNBP dari hasil pemanfaatan TSL	Besara PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Rp. 10 M	051. Penyusunan NSPK 052. Koordinasi Penentuan Harga Patokan TSL 053. Inventarisasi TSL dalam rangka penentuan kuota tangkap/ tangkar 054. Bimbingan Teknis dan Supervisi 055. Pembinaan dan Koordinasi 056. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 wilayah biogeografi	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Species 055. Desiminasi Data dan Informasi 056. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya sistem basis data balai kliring nasional	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik ditingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Operasional Balai Kliring ABS 055. Monitoring dan Evaluasi
		Terbangun dan beroperasinya Suaka Satwa (Sanctuary) species terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) species terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	6 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Blue Print Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa (Sanctuary) Spesies Terancam Punah 055. Monitoring dan Evaluasi
		Layanan Internal (Overhead)			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi				
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	30 dokumen RP	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan 055. Fasilitasi Review Dokumen Rencana Pengelolaan 056. Monitoring dan Evaluasi
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Baseline dan Updating Data METT 055. Verifikasi Hasil Self Assesment METT 056. Monitoring dan Evaluasi
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000ha	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Prakondisi dan rencana pemulihan ekosistem 055. Peningkatan Kapasitas SDM 056. Monitoring dan Evaluasi
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 desa	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penetapan Desa Binaan 055. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat 056. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 ha	051. Penyusunan NSPK 052. Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional 053. Penetapan Pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan 055. Bimbingan Teknis dan Supervisi 056. Pembinaan dan Koordinasi 057. Pengembangan Kemitraan 058. Monitoring dan Evaluasi
		Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Sosialisasi peraturan pengelolaan KPHK 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Monitoring dan Evaluasi
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 provinsi	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Pengembangan Sistem Monev 055. Fasilitasi penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan 056. Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan KK
		Layanan Internal (Overhead)			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
3	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				
		Terintegrasinya zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	Jumlah data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (<i>One Map Policy</i>) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 Kawasan Konservasi di 34 Provinsi	051. Penyusunan NSPK 052. Pembangunan/pengembangan Database Spatial dan Non Spatial 053. Pengelolaan Data dan Informasi 054. Desiminasi Data dan Informasi 055. Koordinasi dan Konsultasi
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi 055. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 paket data	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Pembangunan Sistem IKA 055. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA 056. Desiminasi Data dan Informasi 057. Monitoring dan Evaluasi
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok 055. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terbentuk dan ditetapkan 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	051. Penyusunan NSPK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK 055. Penilaian Rancang Bangun KPHK 056. Penetapan KPHK 057. Monitoring dan Evaluasi
		Layanan Internal (Overhead)			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	2,500,000 orang	051. Penyusunan NSPK 052. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Pencermatan Usulan Design Tapak dan DED Sarpras Wisata Alam 056. Pengembangan SOP Aktivitas Wisata Alam 057. Pengembangan sistem e-PNBP Wisata Alam 058. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam 059. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	1.500 Kwatt	051. Penyusunan NSPK 052. Promosi dan Pemasaran Jasa Lingkungan Energi Air 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Pengelolaan Kawasan Terkait Potensi Air 055. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air 056. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					057. Demplot Mikrohidro Electrical Powerplant 058. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	5 Unit	051. Penyusunan NSPK 052. Promosi dan Pemasaran Jasa Lingkungan Panas Bumi 053. Data dan Informasi Potensi 054. Pengelolaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi 055. Pembinaan dan Koordinasi 056. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	051. Penyusunan NSPK 052. Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 053. Penilaian Pengusahaan Wisata Alam 054. Pembinaan dan Koordinasi 055. Pencermatan Design Tapak 056. Bimbingan Teknis dan Supervisi 057. Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam 058. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi kawasan konservasi minimal 25 unit	5 unit	051. Penyusunan NSPK 052. Promosi dan Pemasaran Jasa Lingkungan Massa Air 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Bimbingan Teknis dan Supervisi 055. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air 056. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air 057. Monitoring dan Evaluasi
		Registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 unit KK	2 KK	051. Penyusunan NSPK 052. Penilaian Calon Lokasi VCS/CCBA REDD+ 053. Pengembangan kerjasama Nasional dan Internasional 054. Pengelolaan Karbon Hutan Konservasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					055. Bimbingan Teknis dan Supervisi 056. Pembinaan dan Koordinasi 057. Monitoring dan Evaluasi
		Layanan Internal (Overhead)			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial				
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa)	051. Koordinasi Perlindungan KEE 052. Survey Lokasi Potensial KEE 053. Fasilitas Pembentukan KEE oleh UPT 054. Pemantapan Perlindungan KEE 055. Evaluasi Perlindungan KEE 056. Pemetaan KEE
			Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	13 KEE	
		Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	14 paket data	051. Penyusunan paket data dan informasi KEE
		Terbentuknya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direview sebanyak 48 dokumen	14 Dokumen	051. Koordinasi Perlindungan KEE 052. Pemantapan Perlindungan KEE 053. Evaluasi Perlindungan KEE
		Terbentuknya kawasan ekosistem karst yang ditetapkan pengelolaannya	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	2 kawasan	051. Koordinasi Perlindungan KEE 052. Survey Lokasi Potensial KEE 053. Pemantapan Perlindungan KEE 054. Evaluasi Perlindungan KEE



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					055. Pemetaan KEE 056. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelola KEE Karst
		Tersedianya koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasi	Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	051. Koordinasi Perlindungan KEE 052. Survey Lokasi KEE 053. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan KEE 054. Pemetaan KEE 055. Fasilitasi penguatan kelembagaan pengelola Taman Kehati
		Layanan Internal (Overhead)			002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem				
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77,5 poin	77,5	051. Penyusunan Program dan Anggaran 052. Evaluasi dan Pelaporan 053. Data dan Informasi 054. Kerjasama dan Kemitraan 055. Administrasi Kepegawaian 056. Administrasi Jabatan Fungsional 057. Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan 058. Administrasi Keuangan 059. Ketatausahaan dan Umum 060. Administrasi Perlengkapan 061. Peraturan Perundang-undangan 062. Pertimbangan dan Advokasi Hukum
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 005. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					Unit 006. Tanah 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 010. Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) 011. Layanan Internal Organisasi
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.000.000 orang	051. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Monitoring dan Evaluasi 055. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 056. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 057. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di KK non TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di kawasan konservasi non taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	051. Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar 052. Evakuasi Satwa Liar 053. Operasional Pusat Pengembangbiakkan dan Suaka Satwa Liar 054. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa 055. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengembangbiakkan dan Suaka Satwa Liar (<i>Sanctuary</i>) 056. Koordinasi dan Konsultasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	10 Kawasan Konservasi	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Monitoring dan Evaluasi 054. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED
		Keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi non taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di kawasan konservasi non taman nasional yang terbakar maksimal 10.908 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 12.120 Ha)	Maksimum 10.908 Ha	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi 054. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perlindungan dan pengamanan kawasan 055. Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan KK terhadap Karlahut 056. Pemadaman kebakaran hutan di kawasan konservasi 057. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan di Hutan Konservasi 058. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan TWA	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TWA	125 km	051. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 052. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 053. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam 054. Monitoring dan Evaluasi
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TWA	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional	10 paket (dibreakdown per paket)	051. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 052. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 053. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam 054. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut non taman nasional	Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	18 Unit Kawasan Konservasi	051. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 055. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 056. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	10 unit	051. Self Assesment METT 052. Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi 053. Inhouse training dalam rangka penilaian nilai METT 054. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya kontribusi TWA dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari TWA	500 Kwatt	051. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air 052. Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air 053. Demplot Micro Hydro Electrical Power Plant 054. Operasional Micro Hydro Electrical Power Plant 055. Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA 056. Evaluasi IPEA dan IUPEA 057. Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35 unit	051. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan KPHK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	2%	051. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Penyu dan Keanekaragaman Jenis Ikan 052. Monitoring Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 053. Pembinaan Habitat Penyu dan keanekaragaman jenis ikan 054. Pembinaan Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 055. Penanganan konflik penyu dan keanekaragaman jenis ikan dan Manusia 056. Evakuasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 057. Operasional dan pemeliharaan penyu dan keanekaragaman jenis ikan 058. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Penyu dan ikan lainnya 060. Sarana dan Prasarana penanganan penyu dan keanekaragaman jenis ikan 061. Kampanye pelestarian penyu dan keanekaragaman jenis ikan dan tumbuhan alam 062. Inhouse training peningkatan Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	5 Unit	051. Inventarisasi Potensi Panas Bumi 052. Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 054. Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 055. Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi non TN (blok pengelolaan) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah penataan blok pengelolaan kawasan konservasi non TN sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	413 Kawasan Konservasi Non- Taman Nasional	051. Pembangunan/Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial 052. Pengelolaan Data dan Informasi 053. Desiminasi Data dan Informasi 054. Koordinasi dan Konsultasi
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi non TN	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	27 desa	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penetapan Desa Binaan 054. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat 055. Monitoring dan Evaluasi
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional	Prosentase gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian	Maksimum 125 kejadian	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Pengembangan Sistem Monev 054. Fasilitasi penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan 055. Sarana dan Prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi 056. Patroli Fungsional Pengamanan Hutan 057. Patroli Operasi Gabungan 058. Patroli Udara 059. Administrasi Senjata Api dan pemegang senjata api 060. Penanganan Barang Bukti 061. Penanganan Gangguan Satwa Liar 062. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	26 unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Fasilitasi penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan 054. Patroli bersama MMP, TPHL dan penggiat lingkungan lainnya 055. Inhouse training perlindungan dan pengamanan KK 056. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke Luar Negeri bersertifikat	30 unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Assesment Penangkaran 054. Audit Penangkaran 055. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya bahan baku untuk industri berbasis tumbuhan dan satwa liar (TSL)/ <i>bioresources</i>	Produksi hasil penangkaran TSL dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c) Herpetofauna 3.500.000 ekor	6004500 ekor/pcs	051. Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Survey dan Analisa Data Pengusulan Kuota 055. Monitoring dan Evaluasi 056. Koordinasi dan Konsultasi
			Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor ; c) Amphibia 83.839.375 ekor; d) Burung 7.695 ekor ; e) Arthropoda 70.435 ekor; f) Anthozoa 1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000 ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs	6004500 ekor/pcs	051. Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Survey dan Analisa Data Pengusulan Kuota 055. Monitoring dan Evaluasi 056. Koordinasi dan Konsultasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		051. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 052. Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 053. Pembinaan Habitat Satwa Liar 054. Pembinaan Populasi Satwa Liar 055. Penanganan konflik Satwa Liar dan Manusia 056. Evakuasi Satwa Liar 057. Operasional dan pemeliharaan Satwa Liar 058. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa 059. Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) dan Pusat Penyelamatan Satwa 060. Sarana dan Prasarana penanganan Satwa Liar 061. Kampanye pelestarian Satwa Liar dan tumbuhan alam 062. Inhouse training peningkatan Populasi Satwa Liar
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013		051. Pertimbangan Teknis Lembaga Konservasi 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Konservasi 054. Pembinaan dan Koordinasi
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok 054. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi 054. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA 053. Desiminasi Data dan Informasi 054. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK 054. Penilaian Rancang Bangun KPHK 055. Penetapan KPHK 056. Monitoring dan Evaluasi
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Monitoring dan Evaluasi
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Prakondisi dan rencana pemulihan ekosistem 054. Peningkatan Kapasitas SDM 055. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan 054. Fasilitasi Review Dokumen Rencana Pengelolaan 055. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya PNBP dari hasil pemanfaatan TSL	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	051. Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Survey dan Analisa Data Pengusulan Kuota 055. Monitoring dan Evaluasi 056. Koordinasi dan Konsultasi
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	051. Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 052. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 053. Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 054. Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam 055. Penyusunan Database Spesies 056. Desiminasi Data dan Informasi 057. Inhouse training tumbuhan alam
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit	051. Penyusunan Desain Tapak 052. Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA 054. Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA 055. Fasilitas Forum Wisata Alam 056. Pembinaan dan Koordinasi 057. Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 unit	051. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air 052. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air 053. Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air 054. Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA 055. Evaluasi IPA dan IUPA 056. Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	051. Pembentukan Kader Konservasi 052. Kemah Bakti Kader Konservasi 054. Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/ KPA/ KSM/ KP 055. Penilaian KK/ KPA/ KSM/ KP dalam rangka Wana Lestari
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut (Renja Aplikasi)	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35	051. Sosialisasi peraturan pengelolaan KPHK 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 unit	051. Koordinasi Perlindungan KEE 052. Survey Lokasi Potensial KEE 053. Fasilitasi Pembentukan KEE oleh UPT 054. Evaluasi Perlindungan KEE
		Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial			051. Penyusunan paket data dan informasi KEE
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	051. Penyusunan Program dan Anggaran 052. Evaluasi dan Pelaporan 053. Data dan Informasi 054. Kerjasama dan Kemitraan 055. Administrasi Kepegawaian 056. Administrasi Keuangan 057. Ketatausahaan dan Umum 058. Administrasi Perlengkapan 059. Pengembangan Sarana dan Prasarana
		Layanan Internal (Overhead)			001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 006. Tanah



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi
8	Pengelolaan Taman Nasional				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.500.000 orang	051. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Monitoring dan Evaluasi 055. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 056. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 057. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (<i>Sanctuary</i>) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	051. Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar 052. Evakuasi Satwa Liar 053. Operasional Pusat Pengembangbiakkan dan Suaka Satwa Liar 054. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa 055. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengembangbiakkan dan Suaka Satwa Liar (<i>Sanctuary</i>) 056. Koordinasi dan Konsultasi
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	14 TN	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Monitoring dan Evaluasi 054. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di taman nasional yang terbakar maksimal 39.524 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 43.915 Ha)	Maksimum 39.524 Ha	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi 054. Fasilitas Penanganan Permasalahan Perlindungan dan pengamanan kawasan 055. Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan KK terhadap Karlahut 056. Pemadaman kebakaran hutan di kawasan konservasi 057. Kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan di Hutan Konservasi 058. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan Taman Nasional	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TN	165.8 km	051. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 052. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 053. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam 054. Monitoring dan Evaluasi
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas Nasional destinasi wisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional destinasi wisata	4 paket	051. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 052. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 053. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam 054. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari Taman Nasional	1000 Kwatt	051. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air 052. Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air 053. Demplot Micro Hydro Electrical Power Plant 054. Operasional Micro Hydro Electrical Power Plant 055. Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA 056. Evaluasi IPEA dan IUPEA 057. Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasional laut	Jumlah unit kawasan taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	15 Unit	051. Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam 052. Bimbingan Teknis dan Supervisi 053. Pembinaan dan Koordinasi 054. Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam termasuk DED 055. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Alam 056. Operasional Pengelolaan Objek Wisata Alam
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	20 Taman Nasional	051. Self Assesment METT 052. Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi 053. Inhouse training dalam rangka penilaian nilai METT 054. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	2%	051. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Penyu dan Keanekaragaman Jenis Ikan 052. Monitoring Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 053. Pembinaan Habitat Penyu dan keanekaragaman jenis ikan 054. Pembinaan Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 055. Penanganan konflik penyu dan



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
					keanekaragaman jenis ikan dan Manusia 056. Evakuasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan 057. Operasional dan pemeliharaan penyu dan keanekaragaman jenis ikan 058. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Penyu dan ikan lainnya 059. Operasional Pusat Penyelamatan Penyu 060. Sarana dan Prasarana penanganan penyu dan keanekaragaman jenis ikan 061. Kampanye pelestarian penyu dan keanekaragaman jenis ikan dan tumbuhan alam 062. Inhouse training peningkatan Populasi penyu dan keanekaragaman jenis ikan
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Taman Nasional	5 Unit	051. Inventarisasi Potensi Panas Bumi 052. Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 054. Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 055. Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar TN	Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	51 desa	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penetapan Desa Binaan 054. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat 055. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	250.000 ha (47 desa)	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penetapan Desa Binaan 054. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat 055. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi TN (zonasi) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan taman nasional sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	3 TN	051. Pembangunan/Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial 052. Pengelolaan Data dan Informasi 053. Desiminasi Data dan Informasi 054. Koordinasi dan Konsultasi
		Menurunnya gangguan pada kawasan taman nasional	Persentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian	Maksimum 124 kejadian	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Pengembangan Sistem Monev 054. Fasilitasi penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan 055. Sarana dan Prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi 056. Patroli Fungsional Pengamanan Hutan 057. Patroli Operasi Gabungan 058. Patroli Udara 059. Administrasi Senjata Api dan pemegang senjata api 060. Penanganan Barang Bukti 061. Penanganan Gangguan Satwa Liar 062. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	51 unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Fasilitasi penanganan permasalahan perlindungan dan pengamanan kawasan 054. Patroli bersama MMP, TPHL dan penggiat lingkungan lainnya 055. Inhouse training perlindungan dan pengamanan KK 056. Monitoring dan Evaluasi
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Prakondisi dan rencana pemulihan ekosistem 054. Peningkatan Kapasitas SDM 055. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	10 Dokumen	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok 054. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi 054. Monitoring dan Evaluasi
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA 053. Desiminasi Data dan Informasi 054. Monitoring dan Evaluasi



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Monitoring dan Evaluasi
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	051. Bimbingan Teknis dan Supervisi 052. Pembinaan dan Koordinasi 053. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan 054. Fasilitasi Review Dokumen Rencana Pengelolaan 055. Monitoring dan Evaluasi
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	051. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 052. Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 053. Pembinaan Habitat Satwa Liar 054. Pembinaan Populasi Satwa Liar 055. Penanganan konflik Satwa Liar dan Manusia 056. Evakuasi Satwa Liar 057. Operasional dan pemeliharaan Satwa Liar 058. Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa 059. Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) dan Pusat Penyelamatan Satwa 060. Sarana dan Prasarana penanganan Satwa Liar 061. Kampanye pelestarian Satwa Liar dan tumbuhan alam 062. Inhouse training peningkatan Populasi Satwa Liar



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	051. Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 052. Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 053. Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 054. Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam 055. Penyusunan Database Spesies 056. Desiminasi Data dan Informasi 057. Inhouse training tumbuhan alam
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	051. Penyusunan Desain Tapak 052. Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam 053. Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA 054. Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA 055. Fasilitasi Forum Wisata Alam 056. Pembinaan dan Koordinasi 057. Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	051. Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air 052. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air 053. Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air 054. Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA 055. Evaluasi IPA dan IUPA 056. Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA



No.	Program/Kegiatan	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KOMPONEN
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	051. Pembentukan Kader Konservasi 052. Kemah Bakti Kader Konservasi 054. Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/ KPA/ KSM/ KP 055. Penilaian KK/ KPA/ KSM/ KP dalam rangka Wana Lestari
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	051. Penyusunan Program dan Anggaran 052. Evaluasi dan Pelaporan 053. Data dan Informasi 054. Kerjasama dan Kemitraan 055. Administrasi Kepegawaian 056. Administrasi Keuangan 057. Ketatausahaan dan Umum 058. Administrasi Perlengkapan 059. Pengembangan Sarana dan Prasarana
		Layanan Internal (Overhead)			001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 006. Tanah 007. Peralatan dan Mesin 008. Gedung dan Bangunan 009. Data dan Informasi 011. Layanan Internal Organisasi



Bagian Program dan Evaluasi
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Direktorat Jenderal KSDAE
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
@2016

ISBN 978-602-60595-2-9



9 786026 059529